

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Wahhab Khallaf. *Al-Siyasah Al-Syar'iyah*. Kairo: Dar Al-Anshar, 1977.
- Abdul Wahhab Khallaf. *Ilmu Ushul Fikih*. Kairo: Dar al-Qalam, 1994.
- Aine Yudha Prastiwi, Imam Fachruddin, dan Agung Pramono. "Implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa di Desa Tanjunggunung." *Jurnal Interaksi* 13, No. 1 (2024).
- Al-Mawardi. *Al-Ahkam As-Sulthaniyyah*. Beirut: Dar al-Fikr, 2006.
- Al-Mawardi. *Al-Ahkam As-Sulthaniyyah*. Diterjemahkan oleh Khalifurrahman Fath dan Fathurrahman. Jakarta: Qisthi Press, 2015.
- A. Djazuli. *Fikih Siyasah: Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-Rambu Syariah*. Jakarta: Kencana, 2018.
- Bogdan, Robert, dan Steven J. Taylor. *Introduction to Qualitative Research Methods: A Phenomenological Approach to the Social Sciences*. New York: John Wiley and Sons, 1975.
- Bungin, Burhan. *Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial Lainnya*. Jakarta: Kencana, 2020.
- Desmita. *Psikologi Perkembangan Peserta Didik*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2006.
- Hanif Nurcholis. *Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*. Jakarta: Erlangga, 2011.
- Jubair Situmorang. *Politik Ketatanegaraan dalam Islam (Siyasah Dusturiyah)*. Bandung: Pustaka Setia, 2012.

- Lufri. Metodologi Penelitian Pendidikan. Padang: UNP Press, 2005.
- Mardiasmo. Akuntansi Sektor Publik. Yogyakarta: Andi, 2018.
- Mardiasmo. Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah. Yogyakarta: Andi Offset, 2020.
- Miles, Matthew B., dan A. Michael Huberman. Analisis Data Kualitatif: Buku Sumber tentang Metode-Metode Baru. Jakarta: UI Press, 2014.
- Muhammad Febrian. Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa terhadap Kinerja Kepala Desa Perspektif Permendagri Nomor 110 Tahun 2016 dan Fikih Siyasah. Skripsi. IAIN Syekh Nurjati Cirebon, 2023.
- Muhammad Iqbal. Fikih Siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam. Jakarta: Prenadamedia Group, 2014.
- Muhdir. "Peran Pembinaan Pejabat Daerah dalam Meningkatkan Kapasitas BPD." Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Politik, 2022.
- Nazifatul Ilmi. "Tinjauan Fikih Siyasah terhadap Peran Pemerintah Daerah dalam Pengawasan Pengendalian dan Pelanggaran berdasarkan Perda Nomor 8 Tahun 2012." Journal of Sharia and Law 2, No. 3 (2023).
- Raco, J.R. Metode Penelitian Kualitatif: Jenis, Karakteristik, dan Keunggulannya. Jakarta: Grasindo, 2010.
- Ridwan HR. Hukum Administrasi Negara. Jakarta: Rajawali Pers, 2023.
- Sedarmayanti. Good Governance: Kepemerintahan yang Baik dalam Rangka Otonomi Daerah. Bandung: Mandar Maju, 2012.
- Sondang P. Siagian. Fungsi-Fungsi Manajemen. Jakarta: Bumi Aksara, 2010.
- Sugiyono. Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif dan R&D. Bandung: Alfabeta, 2020.

- Sutoro Eko. Membangun Desa Partisipatif. Yogyakarta: IRE Press, 2016.
- Toni Markada. Analisis Yuridis Permendagri Nomor 110 Tahun 2016 dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa dalam Kerangka Otonomi Daerah. Skripsi. UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten, 2019.
- Agung Pratama. Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa dalam Pengelolaan Dana Desa Menurut Perspektif Fikih Siyash. Skripsi. UIN Raden Intan Lampung, 2021.
- Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7.
- Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
- Republik Indonesia. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa.
- Pemerintah Kabupaten Tulungagung. Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 73 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tulungagung.
- Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tulungagung. Laporan Realisasi Dana Desa Kabupaten Tulungagung Tahun 2023. Tulungagung: BPKAD Kabupaten Tulungagung, 2023.
- Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Dalam Negeri. Evaluasi Pembinaan dan Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa oleh Pemerintah Daerah. Jakarta: Kementerian Dalam Negeri, 2021.

Badan Pusat Statistik Kabupaten Tulungagung. Kabupaten Tulungagung Dalam Angka 2025. Tulungagung: BPS Kabupaten Tulungagung, 2025.

Diakses pada 2 Juni 2026

<https://tulungagungkab.bps.go.id/id/statistics-table/3/YkVWWFUyNTJTVTloVGpCeFdFVTNaMk5wUzFaUFFUMDkjMw==/jumlah-desa-kelurahan-menurut-kecamatan-di-kabupaten-tulungagung--2025.html>

Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri Kementerian Dalam Negeri. Kajian Penguatan Kapasitas Badan Permusyawaratan Desa dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Jakarta: Kementerian Dalam Negeri, 2022.

Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia. Laporan Monitoring Dana Desa Tahun 2023. Jakarta: KPK RI, 2023.

Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia. Laporan Kinerja Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Tahun 2023. Jakarta: Kemendes PDTT, 2023.

Ombudsman Republik Indonesia. Laporan Tahunan Ombudsman Republik Indonesia Tahun 2022. Jakarta: Ombudsman RI, 2023.